

## Penguatan Civic Resilience Mahasiswa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan Pasca Pandemi Covid-19

Ahmad Muhammad Mustain Nasoha<sup>1\*</sup>, Kamelia Maimunah<sup>2</sup>, Annajmul Muniroh<sup>3</sup>, Annuriyah Nabila<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

<sup>2-4</sup> Pendidikan Agama Islam UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

\*Penulis korespondensi : [mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id)

**Abstrak,** *This study aims to analyze the strengthening of students' civic resilience through Civic Education (PKn) after the COVID-19 pandemic using qualitative methods based on literature review. The COVID-19 pandemic has changed students' social interaction patterns and learning methods, which have an impact on their social engagement and resilience as citizens. This study collects and evaluates literature related to the challenges of Civic Education learning and strategies for strengthening civic resilience in the post-pandemic context. The results show that participatory learning approaches, digital literacy, strengthening social values, and community service activities are key elements in strengthening students' cognitive and social resilience. Learning that integrates digital technology provides opportunities for students to participate more actively in social and political discussions. On the other hand, community service activities based on civic values help students develop a stronger sense of social responsibility. The implications of this research encourage the development of a Civic Education curriculum that is adaptive to current social and technological dynamics so that students become resilient and active citizens. This study also recommends that Civic Education be continuously updated with a more interactive and relevant approach to current needs, to enhance students' ability to participate constructively in the global community.*

**Keywords:** *citizenship education, civic resilience, Covid-19 pandemic, participatory learning, students*

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan civic resilience mahasiswa melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pasca pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka. Pandemi COVID-19 telah mengubah pola interaksi sosial dan metode pembelajaran mahasiswa, yang berpengaruh pada keterlibatan sosial dan ketahanan mereka sebagai warga negara. Kajian ini mengumpulkan dan mengevaluasi literatur terkait tantangan pembelajaran PKn serta strategi penguatan civic resilience pada konteks pasca pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran partisipatif, literasi digital, penguatan nilai sosial, dan aktivitas pengabdian masyarakat merupakan elemen kunci dalam memperkuat ketahanan kognitif dan sosial mahasiswa. Pembelajaran yang mengintegrasikan teknologi digital memberikan peluang bagi mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam diskusi sosial dan politik. Di sisi lain, kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai kewarganegaraan membantu mahasiswa mengembangkan rasa tanggung jawab sosial yang lebih kuat. Implikasi penelitian ini mendorong pengembangan kurikulum PKn yang adaptif terhadap dinamika sosial dan teknologi terkini agar mahasiswa menjadi warga negara yang tangguh dan aktif. Penelitian ini juga menyarankan agar Pendidikan Kewarganegaraan terus diperbarui dengan pendekatan yang lebih interaktif dan relevan dengan kebutuhan zaman, untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpartisipasi secara konstruktif dalam masyarakat global.

**Kata kunci:** civic resilience, mahasiswa, pandemi COVID-19, pembelajaran partisipatif, pendidikan kewarganegaraan

### 1. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya adalah dunia pendidikan tinggi. Salah satu perubahan paling mencolok adalah pergeseran total dari pembelajaran tatap muka ke pembelajaran daring (online

learning). Perubahan ini bukan hanya sekadar perubahan teknis dalam cara menyampaikan materi, tetapi juga berdampak besar terhadap cara mahasiswa belajar, berinteraksi, dan membangun koneksi sosial. Proses pembelajaran yang sebelumnya memungkinkan dialog langsung, diskusi kelompok, serta keterlibatan aktif di ruang kelas, berubah menjadi interaksi virtual yang terbatas, seringkali pasif, dan kurang mendukung partisipasi sosial mahasiswa secara optimal (Ramadia, Hidayah, & Sari, 2023).

Dalam konteks inilah, kemampuan mahasiswa untuk mempertahankan dan mengembangkan ketahanan kewarganegaraan atau *civic resilience* menjadi sangat penting. Civic resilience merujuk pada kapasitas individu, khususnya warga negara muda seperti mahasiswa, untuk tetap bersikap kritis, adaptif, dan partisipatif dalam menghadapi perubahan sosial, krisis, atau disrupsi yang terjadi di tengah masyarakat (Sihombing, 2022). Ini mencakup kemampuan untuk tetap terlibat secara aktif dalam isu-isu sosial, mempertahankan nilai-nilai demokrasi, dan terus memberikan kontribusi konstruktif meskipun dihadapkan pada tantangan besar seperti pandemi atau krisis lainnya (Zahra, Maulana, & Suryani, 2023).

Dalam upaya membangun civic resilience, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis sebagai instrumen utama dalam penanaman nilai-nilai demokrasi, tanggung jawab sosial, toleransi, dan kesadaran berkontribusi di tengah masyarakat. PKn idealnya tidak hanya berfungsi sebagai mata kuliah yang menyampaikan teori-teori kewarganegaraan, tetapi juga menjadi ruang yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berdebat secara sehat, memahami isu-isu sosial politik aktual, serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Namun, pada kenyataannya, pendekatan pembelajaran PKn di banyak institusi pendidikan tinggi masih bersifat normatif, teoritis, dan kurang kontekstual terhadap perkembangan zaman (Maulana, Zahra, & Suryani, 2023; Latifa & Hendra, 2023). Metode pembelajaran yang tidak interaktif, minim penggunaan teknologi yang relevan, serta kurang mengakomodasi perspektif mahasiswa menjadikan PKn belum mampu secara maksimal membentuk ketahanan kewarganegaraan di kalangan mahasiswa.

Selain itu, mahasiswa pasca pandemi juga menghadapi tantangan baru yang tidak kalah serius. Fenomena digital fatigue atau kelelahan akibat penggunaan teknologi digital secara berlebihan selama masa pandemi menjadi salah satu masalah utama. Mahasiswa mengalami kejenuhan akibat interaksi daring yang terus-menerus, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan motivasi belajar dan keengganan untuk terlibat dalam aktivitas sosial secara virtual maupun nyata. Tidak hanya itu, keterbatasan akses terhadap teknologi dan jaringan internet yang memadai juga masih menjadi kendala bagi sebagian mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi (Pradana, Hidayat, & Latifah,

2023; Ramadia et al., 2023). Hal ini turut memengaruhi kualitas partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran maupun dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang mendukung penguatan civic resilience.

Dengan demikian, tantangan dalam membentuk ketahanan kewarganegaraan mahasiswa pasca pandemi tidak hanya terletak pada aspek individual seperti motivasi dan kesiapan mental, tetapi juga pada sistem dan metode pendidikan itu sendiri. Diperlukan inovasi dalam pembelajaran PKn yang lebih kontekstual, partisipatif, berbasis teknologi, dan mampu menjawab tantangan era digital. Selain itu, dukungan institusi pendidikan tinggi dalam menciptakan ruang-ruang dialog yang inklusif dan memberdayakan, sangat krusial untuk memastikan bahwa mahasiswa tetap memiliki semangat dan kapasitas untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai dinamika sosial di masa depan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### **Civic Resilience Mahasiswa: Pilar Ketahanan Demokrasi di Era Dinamis**

Civic resilience atau ketahanan kewarganegaraan merupakan konsep penting dalam kajian kewarganegaraan yang menekankan pada kapasitas individu—terutama generasi muda seperti mahasiswa—untuk tetap tangguh, adaptif, dan mampu berkontribusi secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, terlebih di tengah situasi krisis, ketidakpastian, atau perubahan sosial yang kompleks dan dinamis. Konsep ini tidak hanya menyangkut ketahanan pribadi terhadap tekanan eksternal, melainkan juga berkaitan dengan kemampuan individu untuk mempertahankan komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, dan partisipasi aktif dalam kehidupan publik. Dalam hal ini, mahasiswa memiliki posisi strategis, karena selain berperan sebagai peserta dalam sistem pendidikan tinggi, mereka juga dipandang sebagai agen perubahan sosial (*change agents*) yang memiliki potensi besar untuk membawa gagasan baru, mengkritisi kebijakan publik, dan mendorong transformasi sosial ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Sihombing (2022) mendefinisikan civic resilience sebagai kemampuan warga negara untuk mempertahankan sikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Definisi ini menyoroti pentingnya integritas moral, kesadaran politik, serta keberanian moral untuk terlibat dalam diskursus publik dan aksi kolektif, khususnya dalam situasi yang menuntut keberpihakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Bagi kalangan mahasiswa, civic resilience menjadi kompetensi yang semakin penting, terutama dalam konteks pasca-pandemi COVID-

19 yang telah menguji ketahanan sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat secara luas. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi penerima dampak, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dengan menunjukkan sikap resilien yang berpijak pada kesadaran kewarganegaraan yang aktif dan progresif.

Ketahanan kewarganegaraan pada mahasiswa mencakup beberapa dimensi yang saling berkelindan, yakni dimensi mental, emosional, dan sosial. Pada dimensi mental, mahasiswa perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi di sekeliling mereka. Kemampuan ini penting agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi, polarisasi opini, atau narasi yang manipulatif, terutama di era digital yang sarat dengan arus informasi yang cepat dan tidak selalu akurat. Mahasiswa yang resilien secara mental akan mampu memilah informasi, membentuk opini berdasarkan data dan nilai-nilai etis, serta menyampaikan pandangannya secara rasional dan bertanggung jawab.

Secara emosional, civic resilience menuntut ketangguhan psikologis dalam menghadapi tekanan, ketidakpastian, dan tantangan hidup, termasuk stres akibat beban akademik, ketidakpastian masa depan, maupun situasi sosial yang tidak menentu. Ketahanan emosional ini penting agar mahasiswa tidak mudah menyerah atau menarik diri dari ruang-ruang partisipasi publik, melainkan mampu tetap bersikap optimis, empatik, dan adaptif terhadap perubahan. Apalagi selama dan setelah pandemi COVID-19, banyak mahasiswa yang menghadapi tantangan besar dalam hal kesehatan mental, akses pendidikan, hingga peluang kerja. Dalam kondisi tersebut, civic resilience dapat menjadi daya dorong bagi mahasiswa untuk tetap aktif dalam proses pembelajaran maupun kegiatan sosial.

Sementara itu, dari sisi sosial, civic resilience tercermin dari kemauan dan kemampuan mahasiswa untuk membangun jejaring sosial, memperkuat solidaritas antarwarga, dan terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan kemasyarakatan, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Partisipasi sosial ini bisa berupa keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, kegiatan sukarelawan, forum-forum diskusi publik, hingga advokasi kebijakan. Ahmad (2023) menekankan bahwa aspek sosial dari civic resilience tidak hanya memperkuat hubungan antarindividu, tetapi juga berperan dalam memperkuat kohesi sosial, membangun kepercayaan antarwarga, dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap komunitas dan bangsa.

Secara keseluruhan, civic resilience bukan hanya penting untuk ketahanan individu mahasiswa dalam menghadapi tekanan hidup, tetapi juga merupakan elemen kunci dalam memperkuat demokrasi, stabilitas sosial, dan keberlanjutan masyarakat. Mahasiswa yang

memiliki civic resilience yang tinggi akan lebih mampu menjalankan peran sebagai warga negara yang aktif, peduli, dan bertanggung jawab, serta mampu menginspirasi lingkungan sekitarnya untuk melakukan hal yang sama. Dalam jangka panjang, investasi pada pembangunan civic resilience di kalangan mahasiswa merupakan investasi strategis bagi masa depan bangsa yang lebih tangguh, adil, dan demokratis.

### **Peran Strategis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam Membangun Civic Resilience**

Dalam upaya membentuk mahasiswa sebagai warga negara yang tangguh, adaptif, dan partisipatif, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memegang peranan yang sangat strategis. PKn bukan sekadar mata kuliah yang memberikan pemahaman normatif mengenai hak dan kewajiban warga negara, tetapi juga merupakan sarana transformatif dalam pembentukan karakter, nilai, dan kompetensi kewarganegaraan yang esensial dalam menghadapi tantangan zaman. Civic resilience atau ketahanan kewarganegaraan, sebagai kemampuan individu untuk tetap berdaya, berpikir kritis, dan aktif berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sangat erat kaitannya dengan kualitas pendidikan kewarganegaraan yang diterima mahasiswa selama proses pembelajaran.

Menurut Latifa dan Hendra (2023), Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif harus mampu membekali peserta didik dengan tiga kompetensi utama yang menjadi fondasi dari civic resilience, yakni: pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Ketiga aspek ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat aplikatif dalam kehidupan nyata. Pengetahuan kewarganegaraan mencakup pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip dasar demokrasi, sistem pemerintahan, konstitusi, hak asasi manusia, serta dinamika kehidupan politik dan sosial dalam konteks kebangsaan. Sikap kewarganegaraan merujuk pada nilai-nilai seperti toleransi, tanggung jawab, empati, keadilan, serta komitmen terhadap kepentingan bersama. Sementara itu, keterampilan kewarganegaraan mencakup kemampuan untuk berdialog, berargumentasi secara rasional, mengambil keputusan secara etis, serta berpartisipasi dalam aktivitas sosial-politik secara aktif dan konstruktif.

Pendidikan Kewarganegaraan yang bermakna dan kontekstual dapat mendorong tumbuhnya kesadaran kritis mahasiswa terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, civic resilience menjadi semacam kompetensi hidup (*life competency*) yang memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya memahami realitas sosial secara objektif, tetapi juga mampu mengambil posisi dan tindakan yang mencerminkan kepedulian dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini menjadi sangat penting di tengah

meningkatnya tantangan sosial-politik seperti polarisasi, intoleransi, krisis kepercayaan terhadap institusi publik, hingga penyebaran disinformasi di era digital. Mahasiswa yang dibekali dengan civic resilience akan lebih mampu merespons situasi tersebut dengan cara yang konstruktif, dialogis, dan solutif.

Selain itu, PKn juga memiliki peran penting dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi yang menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses pembelajaran PKn idealnya tidak bersifat satu arah atau berbasis hafalan semata, melainkan partisipatif, dialogis, dan reflektif. Metode pembelajaran yang mengedepankan diskusi, studi kasus, simulasi musyawarah, serta analisis isu-isu aktual akan lebih efektif dalam menumbuhkan kesadaran kewarganegaraan mahasiswa. Dalam proses ini, mahasiswa dilatih untuk menjadi warga negara yang aktif (*active citizen*), bukan hanya sebagai penonton dalam arena demokrasi, tetapi sebagai aktor yang sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sosialnya.

Lebih jauh lagi, Pendidikan Kewarganegaraan yang dikelola secara progresif dapat menjadi ruang strategis untuk membentuk karakter kebangsaan yang kokoh. Dalam hal ini, civic resilience tidak hanya dilihat sebagai respons terhadap krisis, tetapi juga sebagai kapasitas jangka panjang untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan, memperkuat kohesi sosial, dan merawat keberagaman. Mahasiswa yang memiliki pemahaman dan kesadaran kebangsaan yang kuat akan lebih siap menghadapi dinamika globalisasi, disrupsi teknologi, serta tantangan pluralisme tanpa kehilangan jati diri dan komitmen terhadap bangsa.

Perlu juga dicatat bahwa peran strategis PKn dalam membangun civic resilience mahasiswa sangat ditentukan oleh kualitas kurikulum, kompetensi pendidik, serta dukungan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis. Kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman, dosen yang mampu menjadi fasilitator pembelajaran kritis, serta suasana kampus yang mendorong dialog terbuka dan kebebasan akademik merupakan elemen-elemen kunci yang memperkuat efektivitas PKn. Tanpa dukungan ini, pembelajaran PKn akan cenderung bersifat normatif dan tidak kontekstual, sehingga gagal menyentuh aspek afektif dan psikomotorik mahasiswa yang seharusnya menjadi titik tekan dalam pendidikan kewarganegaraan modern.

Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak dapat diposisikan sekadar sebagai kewajiban kurikuler, tetapi harus menjadi pilar utama dalam proses pembentukan identitas kewargaan mahasiswa yang resilien. Melalui PKn yang transformatif, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep-konsep dasar kewarganegaraan, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, menjalankan tanggung jawab sosial, serta berkontribusi aktif dalam membangun masyarakat yang lebih adil, toleran, dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, penguatan civic resilience melalui PKn akan turut menentukan kualitas demokrasi dan daya tahan sosial bangsa Indonesia di masa depan.

### **Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pendidikan Kewarganegaraan dan Interaksi Sosial Mahasiswa**

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 telah membawa dampak luas di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Salah satu disrupsi paling signifikan terjadi dalam proses pembelajaran di pendidikan tinggi, di mana pembelajaran tatap muka yang selama ini menjadi andalan harus digantikan dengan sistem pembelajaran daring (*online learning*). Meskipun transformasi digital dalam pendidikan menjadi solusi cepat untuk menjaga keberlangsungan proses belajar-mengajar, namun dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), transisi ini menghadirkan tantangan yang cukup besar, baik secara pedagogis maupun sosial.

Pendidikan Kewarganegaraan, secara konseptual, bukan sekadar proses transfer pengetahuan tentang hukum, politik, dan sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan proses pembentukan karakter kewargaan, internalisasi nilai-nilai demokrasi, serta pelatihan keterampilan sosial dan partisipatif. Proses ini sangat bergantung pada interaksi sosial yang terjadi secara langsung antara mahasiswa, dosen, dan lingkungan sekitar. Ketika pembelajaran PKn dipindahkan ke ruang digital, aspek-aspek substantif tersebut menjadi sulit untuk dipertahankan secara utuh. Dalam kelas daring, pembelajaran cenderung menjadi satu arah, interaksi terbatas, dan ruang-ruang dialog kritis maupun reflektif menjadi terpinggirkan.

Ramadia, Hidayah, dan Sari (2023) menyoroti bahwa pembelajaran daring selama pandemi menyebabkan penurunan signifikan dalam partisipasi mahasiswa, tidak hanya dalam konteks akademik seperti diskusi kelas, tetapi juga dalam kegiatan organisasi, forum mahasiswa, dan aktivitas sosial lainnya. Padahal, aktivitas-aktivitas tersebut selama ini menjadi media penting dalam pembentukan civic engagement dan civic responsibility mahasiswa. Ketika ruang-ruang partisipasi ini menghilang atau melemah, maka nilai-nilai kewarganegaraan seperti solidaritas, empati, toleransi, dan kepedulian sosial pun tidak lagi terbentuk melalui pengalaman nyata. Mahasiswa menjadi lebih pasif, terisolasi secara sosial, dan kurang terpapar pada dinamika kehidupan berbangsa yang sesungguhnya.

Selain itu, fenomena *digital fatigue*—yakni kelelahan akibat penggunaan teknologi secara terus-menerus untuk keperluan belajar dan berinteraksi—menjadi masalah baru yang memperburuk kualitas pendidikan daring. Sari dan Dewi (2023) mencatat bahwa banyak mahasiswa mengalami penurunan motivasi belajar, penurunan fokus, hingga keterasingan sosial karena intensitas interaksi digital yang tinggi namun minim makna. Dalam konteks PKn,

kondisi ini menghambat proses internalisasi nilai-nilai kewargaan yang menuntut keterlibatan emosional, intelektual, dan sosial secara menyeluruh.

Pandemi juga memperbesar kesenjangan akses terhadap teknologi dan infrastruktur pendidikan. Mahasiswa dari daerah tertinggal, terpencil, atau dari keluarga ekonomi menengah ke bawah menghadapi kesulitan dalam mengakses internet yang stabil, perangkat belajar seperti laptop atau smartphone, serta ruang belajar yang kondusif. Kesenjangan digital ini menciptakan hambatan struktural dalam proses pembelajaran PKn, yang pada akhirnya menghambat proses pembentukan civic resilience. Ketika akses pendidikan tidak merata, maka kesempatan untuk memperoleh pengetahuan kewarganegaraan, berpartisipasi dalam ruang publik digital, maupun terlibat dalam dialog sosial menjadi tidak setara. Ketidaksetaraan ini tidak hanya memperlemah pembelajaran, tetapi juga berpotensi memperdalam jurang sosial di kalangan mahasiswa.

Dampak jangka panjang dari situasi ini adalah tergerusnya kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menjalankan peran sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Civic resilience, yang seharusnya dikembangkan melalui pembelajaran PKn dan interaksi sosial, menjadi sulit terbentuk secara optimal. Mahasiswa yang tidak mendapatkan pengalaman berinteraksi langsung dalam konteks sosial-politik cenderung kehilangan sensitivitas terhadap isu-isu kebangsaan, cenderung apatis terhadap dinamika sosial, dan kurang memiliki kesadaran kritis terhadap pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi.

Oleh karena itu, situasi ini menuntut adanya inovasi dalam pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen dan institusi pendidikan perlu mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan partisipatif, meskipun dalam format daring. Ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis proyek (*project-based learning*), diskusi daring interaktif, simulasi musyawarah virtual, serta penggunaan media sosial sebagai ruang belajar yang kontekstual dan relevan. Selain itu, dukungan terhadap infrastruktur digital dan kebijakan afirmatif bagi mahasiswa kurang mampu menjadi syarat mutlak agar kesenjangan pendidikan tidak semakin melebar.

### **Transformasi Digital sebagai Peluang Baru untuk Partisipasi Kewarganegaraan**

Di balik berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, termasuk disrupsi terhadap sistem pendidikan dan terbatasnya interaksi sosial langsung, transformasi digital justru membuka peluang baru dalam membentuk dan memperluas ruang partisipasi kewarganegaraan mahasiswa. Pandemi telah mempercepat digitalisasi di hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas sosial-politik, komunikasi publik, dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks ini, media sosial dan berbagai platform digital lainnya kini



menjelma menjadi arena baru yang memungkinkan mahasiswa untuk mengekspresikan pendapat, menyuarakan aspirasi, serta berkontribusi secara aktif dalam diskursus publik dan kehidupan demokratis.

Trihastuti, Firman, dan Widya (2023) menyatakan bahwa ruang digital telah menggantikan banyak bentuk partisipasi konvensional yang sebelumnya berbasis tatap muka, seperti diskusi kampus, demonstrasi, maupun forum-forum komunitas. Generasi muda, khususnya mahasiswa, menunjukkan kecenderungan yang semakin tinggi untuk memanfaatkan platform seperti Instagram, Twitter (X), YouTube, dan TikTok sebagai media untuk menyuarakan kepedulian mereka terhadap isu-isu sosial, politik, lingkungan, dan hak asasi manusia. Melalui konten-konten kreatif, kampanye digital, petisi online, hingga diskusi daring, mahasiswa kini memiliki ruang yang lebih luas dan lebih fleksibel untuk menjadi bagian dari wacana publik. Transformasi ini membawa potensi besar dalam membentuk civic engagement yang lebih inklusif dan sesuai dengan karakteristik generasi digital.

Namun demikian, potensi ini tidak serta-merta bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa adanya kemampuan pendukung yang memadai, khususnya dalam hal literasi digital. Literasi digital bukan hanya sekadar kemampuan teknis menggunakan perangkat teknologi dan mengakses informasi, tetapi juga mencakup aspek kognitif dan etis yang lebih mendalam. Firman dan Widya (2022) serta Nurhadi (2022) menekankan bahwa literasi digital mencakup kemampuan berpikir kritis dalam memilah dan menyaring informasi, mengenali hoaks dan disinformasi, memahami konteks sosial-politik dari sebuah isu, serta mengembangkan etika berkomunikasi yang konstruktif di ruang publik digital.

Dalam konteks partisipasi kewarganegaraan, literasi digital menjadi prasyarat penting agar mahasiswa tidak hanya menjadi *konsumen pasif* informasi, tetapi juga mampu menjadi *produsen aktif* dari narasi-narasi kewarganegaraan yang positif dan transformatif. Tanpa literasi digital yang baik, mahasiswa rentan terjebak dalam arus informasi yang bias, provokatif, bahkan manipulatif, yang justru dapat merusak kualitas demokrasi digital. Lebih parah lagi, mahasiswa yang tidak memiliki kesadaran kritis terhadap dinamika komunikasi digital dapat secara tidak sadar menjadi bagian dari penyebaran informasi yang keliru (*misinformation*) atau disengaja (*disinformation*), yang memperburuk polarisasi dan konflik sosial di masyarakat.

Oleh karena itu, penguatan literasi digital harus menjadi bagian integral dari strategi pembaruan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pasca pandemi. PKn perlu bertransformasi dari pembelajaran yang berfokus pada pengetahuan normatif ke arah pembelajaran yang aplikatif, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan pola komunikasi masyarakat. Mahasiswa perlu dilatih untuk tidak hanya memahami konsep

demokrasi dan hak-hak sipil secara teoritis, tetapi juga untuk menerapkannya secara etis dan efektif dalam konteks digital. Ini mencakup pelatihan dalam mengenali *fake news*, penggunaan media sosial secara bijak, serta kemampuan berdialog dalam ruang digital secara argumentatif dan inklusif.

Lebih jauh, ruang digital juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran yang memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan. Penggunaan platform digital seperti forum diskusi online, blog kewarganegaraan, kanal YouTube edukatif, serta podcast isu sosial-politik dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari proses pembelajaran PKn yang lebih menarik dan relevan. Kegiatan berbasis proyek digital, seperti pembuatan konten kampanye sosial, pengelolaan akun media sosial bertema kewarganegaraan, atau pengembangan aplikasi edukatif, dapat menjadi sarana baru untuk membentuk civic skills mahasiswa secara langsung melalui pengalaman nyata.

Namun, untuk mengoptimalkan peran ruang digital dalam membentuk civic resilience mahasiswa, perlu ada dukungan dari berbagai pihak. Institusi pendidikan tinggi perlu menyediakan akses teknologi yang merata, pelatihan literasi digital bagi mahasiswa dan dosen, serta kebijakan yang mendorong integrasi teknologi dalam pembelajaran secara bijak. Pemerintah, melalui kementerian terkait, juga perlu menyusun kebijakan literasi digital nasional yang menargetkan kelompok mahasiswa sebagai salah satu prioritas dalam pembentukan generasi muda yang sadar dan bertanggung jawab secara digital.

Dengan demikian, meskipun pandemi telah mengubah lanskap pendidikan dan partisipasi sosial secara drastis, era digital pasca-pandemi justru membuka kesempatan baru bagi mahasiswa untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan beretika. Tantangan utama yang harus diatasi bukan hanya akses terhadap teknologi, tetapi lebih pada kemampuan untuk menggunakan teknologi secara bermakna dalam membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan inklusif. Pendidikan Kewarganegaraan harus mengambil peran sentral dalam proses ini, dengan menjadikan literasi digital sebagai pilar utama dalam membentuk civic resilience generasi muda di era digital.

### **Inovasi Metode Pembelajaran dalam Membangun Civic Resilience**

Dalam upaya membangun *civic resilience* atau ketahanan kewarganegaraan mahasiswa secara utuh, tidak hanya substansi atau konten materi ajar yang perlu diperbarui, tetapi juga pendekatan pedagogis atau metode pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Transformasi metode pembelajaran menjadi suatu keharusan dalam menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks dan dinamis, terutama dalam menghadapi disrupsi sosial, politik, dan teknologi pasca pandemi COVID-19. Inovasi dalam metode

pembelajaran menjadi kunci untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan secara lebih efektif dan kontekstual, sekaligus mendorong penguatan kapasitas mahasiswa sebagai warga negara yang tangguh, kritis, dan berdaya saing.

Model pembelajaran yang bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis kontekstual—seperti *problem-based learning* (PBL), *project-based learning* (PjBL), pembelajaran berbasis isu sosial (*issue-based learning*), dan simulasi kebijakan publik—telah terbukti memberikan dampak positif dalam memperkuat civic engagement serta kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Pradana, Hidayat, dan Latifah (2023) menyebutkan bahwa melalui pendekatan pembelajaran yang menghadirkan permasalahan nyata dari lingkungan sosial, mahasiswa diajak untuk tidak hanya memahami teori kewarganegaraan secara pasif, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam proses identifikasi masalah, analisis akar persoalan, perumusan solusi, dan refleksi atas tindakan yang diambil. Hal ini memungkinkan terciptanya keterkaitan langsung antara dunia akademik dan realitas kehidupan masyarakat.

Dalam *problem-based learning*, misalnya, mahasiswa dihadapkan pada persoalan sosial-politik yang aktual—seperti korupsi, intoleransi, pelanggaran hak asasi manusia, atau polarisasi politik—yang harus mereka kaji dan pecahkan secara kelompok melalui pendekatan multidisipliner. Pembelajaran semacam ini tidak hanya mendorong keterampilan berpikir kritis, tetapi juga kemampuan komunikasi, kolaborasi, serta pemahaman etis yang mendalam terhadap dilema kewarganegaraan yang nyata. Sementara dalam *project-based learning*, mahasiswa diberi kesempatan untuk merancang dan melaksanakan proyek sosial yang berdampak langsung pada komunitas, seperti kampanye literasi digital, kegiatan advokasi lingkungan, atau program peningkatan kesadaran hak konstitusional warga. Proyek-proyek ini membuka ruang bagi mahasiswa untuk mengalami secara langsung dinamika sosial masyarakat dan membangun kepekaan sosial yang tinggi.

Di sisi lain, metode seperti simulasi kebijakan publik atau *mock parliament* dapat melatih mahasiswa untuk memahami proses pengambilan keputusan politik secara praktis. Dalam simulasi ini, mahasiswa memainkan peran sebagai aktor-aktor dalam sistem politik—misalnya sebagai anggota legislatif, eksekutif, kelompok kepentingan, atau masyarakat sipil—dan diminta untuk merancang serta memperdebatkan suatu kebijakan. Proses ini tidak hanya mengasah kemampuan retorika dan argumentasi logis, tetapi juga menanamkan pentingnya kompromi, dialog, dan kepentingan bersama dalam kehidupan demokrasi.

Aspek penting lainnya dari inovasi metode pembelajaran adalah penguatan dimensi afektif mahasiswa, yaitu kemampuan untuk merasakan, berempati, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai moral serta kepedulian sosial. Hasanah, Pratama, dan Rahayu (2022) menekankan

bahwa aspek afektif seperti empati, solidaritas sosial, dan toleransi menjadi pondasi penting dalam membentuk ketahanan emosional dan sosial mahasiswa. Ketika mahasiswa dilibatkan dalam pembelajaran yang mengangkat pengalaman nyata—misalnya kisah korban ketidakadilan, konflik antar kelompok, atau praktik diskriminasi—maka mereka tidak hanya belajar memahami secara rasional, tetapi juga mengalami secara emosional. Proses ini penting dalam membentuk kepribadian warga negara yang tidak hanya rasional, tetapi juga bermoral dan humanis.

Dengan kata lain, pendekatan pembelajaran yang inovatif memungkinkan Pendidikan Kewarganegaraan menjadi lebih dari sekadar mata kuliah informatif. Ia menjelma menjadi ruang transformatif yang mengintegrasikan ranah kognitif (pengetahuan), afektif (nilai dan sikap), serta psikomotorik (keterampilan). Mahasiswa tidak hanya diajarkan *apa* yang harus diketahui sebagai warga negara, tetapi juga *mengapa* hal tersebut penting, dan *bagaimana* mereka dapat berperan secara aktif dalam kehidupan publik. Ketika pembelajaran mampu menyentuh ketiga ranah tersebut secara simultan, maka civic resilience dapat tumbuh sebagai hasil dari proses pembelajaran yang menyeluruh dan bermakna.

Namun demikian, penerapan inovasi metode pembelajaran ini tentu membutuhkan dukungan dari berbagai elemen. Dosen sebagai fasilitator pembelajaran perlu dibekali dengan pelatihan pedagogik yang relevan, dukungan kurikulum yang fleksibel, serta akses terhadap sumber belajar dan teknologi pendidikan. Di sisi lain, institusi pendidikan juga perlu menciptakan ekosistem akademik yang mendukung pembelajaran aktif dan partisipatif, termasuk memberikan ruang kebebasan akademik, membuka ruang dialog kritis, dan mengakui pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman.

Dengan demikian, inovasi metode pembelajaran bukan hanya menjadi pelengkap dalam penguatan civic resilience mahasiswa, tetapi menjadi prasyarat mutlak dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat secara moral, sosial, dan kewargaan. Dalam konteks dunia yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas, mahasiswa dengan civic resilience yang kuat—yang terbentuk melalui pembelajaran yang hidup, reflektif, dan transformatif—akan menjadi aktor penting dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat demokrasi, dan menciptakan masyarakat yang adil serta inklusi.

### **Keterlibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Sosial sebagai Sarana Pembentukan Civic Resilience**

Pembentukan *civic resilience* atau ketahanan kewarganegaraan tidak dapat sepenuhnya diwujudkan hanya melalui proses pembelajaran formal di ruang kelas, baik dalam format daring (online) maupun luring (tatap muka). Meskipun pembelajaran berbasis kurikulum

memiliki peran fundamental dalam mentransfer pengetahuan dan membentuk kerangka berpikir mahasiswa mengenai hak, kewajiban, serta prinsip-prinsip demokrasi, nilai-nilai tersebut tidak akan memiliki makna yang mendalam tanpa disertai pengalaman langsung dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa dalam berbagai kegiatan sosial di luar ruang kelas menjadi salah satu sarana paling efektif untuk membumikan nilai-nilai kewarganegaraan yang telah dipelajari secara teoritis ke dalam praktik nyata yang kontekstual dan berdampak.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, program *Merdeka Belajar – Kampus Merdeka* (MBKM), Kuliah Kerja Nyata (KKN), serta partisipasi dalam organisasi kemahasiswaan merupakan beberapa bentuk kegiatan nyata yang mampu menjadi ruang pembelajaran alternatif dalam membentuk civic resilience. Hidayah, Ramadia, dan Sari (2022) menekankan bahwa melalui kegiatan-kegiatan tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar mengamati dan memahami berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, tetapi juga dituntut untuk merespons persoalan tersebut dengan solusi yang bersifat kolaboratif, inovatif, dan berbasis pada nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial, serta kepedulian terhadap sesama.

Pengalaman langsung ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai dimensi civic resilience, seperti kemampuan berpikir kritis terhadap ketimpangan sosial, keberanian menyuarakan kepentingan publik, keterampilan berkomunikasi dengan berbagai lapisan masyarakat, serta kesediaan untuk bekerja sama lintas latar belakang sosial dan budaya. Misalnya, dalam program KKN tematik yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan atau edukasi kesehatan di masa pasca-pandemi, mahasiswa dituntut untuk tidak hanya menjadi pelaksana program, tetapi juga perancang kegiatan yang memahami kebutuhan masyarakat lokal, menghargai kearifan lokal, serta memfasilitasi partisipasi warga secara aktif. Proses ini secara langsung mengasah kemampuan adaptif, empatik, dan solutif mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.

Lebih dari itu, keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan, baik yang bersifat intra-kampus seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), maupun ekstra-kampus seperti organisasi kepemudaan, keagamaan, dan komunitas advokasi, menjadi wadah penting untuk mempraktikkan nilai-nilai demokrasi secara internal. Dalam organisasi-organisasi ini, mahasiswa belajar mengenai proses pengambilan keputusan kolektif, penyusunan program kerja berbasis kebutuhan anggota dan masyarakat, manajemen konflik, serta proses advokasi terhadap isu-isu sosial-politik tertentu.

Keterlibatan ini juga memperkuat jiwa kepemimpinan, solidaritas, serta komitmen terhadap perubahan sosial yang berkelanjutan.

Kegiatan sosial juga berperan sebagai jembatan antara dunia kampus dan realitas masyarakat. Ketika mahasiswa turun langsung ke lapangan, mereka tidak hanya menjadi pengamat, tetapi juga bagian dari proses transformasi sosial. Mereka belajar bahwa solusi tidak selalu bisa diambil secara teoritis, tetapi harus melalui dialog, kompromi, dan pemahaman kontekstual terhadap dinamika masyarakat. Dalam konteks ini, civic resilience tidak lagi bersifat abstrak atau normatif, tetapi menjelma menjadi suatu kapasitas nyata yang dapat diukur dari tindakan, kontribusi, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh mahasiswa.

Keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan sosial juga memiliki efek penguatan terhadap identitas kewargaan. Mahasiswa yang terlibat secara aktif akan memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap perannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab, tidak hanya dalam konteks pemilu atau kegiatan politik formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik solidaritas, kerja sama lintas sektor, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan kata lain, melalui keterlibatan sosial, mahasiswa dapat menginternalisasi peran mereka sebagai *agent of change* dan *social transformer* yang mampu membawa nilai-nilai kebangsaan ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Namun demikian, agar keterlibatan sosial ini benar-benar efektif dalam membentuk civic resilience, diperlukan dukungan struktural dari pihak perguruan tinggi. Institusi pendidikan tinggi perlu menyediakan kebijakan yang mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan sosial sebagai bagian integral dari proses pembelajaran, bukan sekadar aktivitas ekstrakurikuler. Ini bisa dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan pengabdian masyarakat ke dalam sistem penilaian akademik, menyediakan dukungan finansial dan logistik untuk kegiatan kemahasiswaan, serta membuka ruang kolaborasi antara kampus dan komunitas lokal. Selain itu, diperlukan pendampingan dan refleksi yang sistematis pasca kegiatan, agar mahasiswa dapat mengevaluasi pengalaman mereka dan mengaitkannya dengan pembelajaran kewarganegaraan secara holistik.

Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosial bukan hanya menjadi pelengkap dalam pendidikan kewarganegaraan, tetapi merupakan sarana strategis dan substansial dalam membentuk civic resilience. Melalui pengalaman sosial yang nyata, mahasiswa akan mampu membangun ketahanan mental, emosional, dan sosial yang dibutuhkan untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan berbangsa. Ketika mahasiswa tumbuh menjadi individu yang peduli, kritis, dan aktif dalam kehidupan sosial, maka mereka

tidak hanya memperkuat dirinya sendiri sebagai warga negara, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi dan kohesi sosial dalam masyarakat secara keseluruhan.

### **Pendekatan Holistik dalam Pendidikan Kewarganegaraan**

Menjawab tantangan dan peluang yang muncul pasca pandemi COVID-19, pendekatan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus mengalami transformasi yang signifikan agar mampu membekali mahasiswa dengan ketahanan kewarganegaraan (*civic resilience*) yang kuat dan menyeluruh. Dalam konteks ini, Nasoha (2024) menekankan urgensi penerapan pendekatan holistik sebagai kerangka pedagogis yang mengintegrasikan tiga dimensi utama pembelajaran, yaitu dimensi kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan nilai), serta psikomotorik (keterampilan dan tindakan). Pendekatan ini dirancang untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak sekadar memperoleh informasi secara intelektual, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dan mengimplementasikannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Dimensi kognitif dalam pendekatan holistik ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konsep-konsep dasar kewarganegaraan, seperti hak dan kewajiban warga negara, sistem demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta dinamika sosial-politik yang berkembang. Melalui pembelajaran yang sistematis dan kritis, mahasiswa diarahkan untuk tidak hanya menerima informasi secara pasif, melainkan juga mengembangkan kemampuan berpikir analitis dan reflektif yang mampu membedakan fakta dari opini, serta mengidentifikasi berbagai bentuk manipulasi informasi dan disinformasi yang marak di era digital. Pemahaman yang komprehensif ini menjadi fondasi utama dalam membentuk warga negara yang cerdas dan sadar akan perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain aspek kognitif, dimensi afektif memegang peranan penting dalam membentuk sikap dan nilai yang menjadi landasan moral bagi mahasiswa. Melalui pembelajaran yang menekankan nilai-nilai seperti toleransi, empati, keadilan sosial, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kesadaran dan komitmen terhadap kehidupan bersama yang inklusif dan demokratis. Dimensi ini menggarisbawahi bahwa pembentukan *civic resilience* bukan hanya soal kemampuan berpikir kritis, tetapi juga soal kekuatan emosional untuk tetap teguh dalam memegang prinsip-prinsip kewarganegaraan meskipun menghadapi tekanan, konflik, atau situasi krisis. Ketangguhan emosional ini sangat penting, terutama di tengah maraknya polarisasi sosial dan arus informasi yang seringkali bersifat provokatif dan memecah belah.

Selanjutnya, dimensi psikomotorik menekankan pengembangan keterampilan dan kemampuan bertindak yang konkret dan aplikatif. Mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk

memahami dan merasakan nilai-nilai kewarganegaraan, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan sikap tersebut melalui tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Keterampilan seperti komunikasi efektif, kerja sama, kepemimpinan, advokasi, serta pengelolaan konflik menjadi kompetensi inti yang harus dikembangkan. Melalui keterampilan ini, mahasiswa dapat berperan aktif dalam berbagai kegiatan sosial, politik, dan kemasyarakatan dengan cara yang konstruktif dan produktif.

Pendekatan holistik dalam PKn ini memungkinkan terciptanya sinergi antara tiga dimensi tersebut sehingga membentuk civic resilience yang komprehensif. Mahasiswa yang resilien secara kognitif akan mampu menyaring dan menganalisis informasi dengan bijak, menghindari jebakan hoaks dan propaganda. Mereka yang resilien secara afektif akan tetap memegang teguh nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, sekalipun dihadapkan pada tekanan sosial atau konflik ideologi. Sementara mahasiswa yang memiliki resilien psikomotorik akan mampu mengambil tindakan yang tepat dan efektif dalam menjaga keharmonisan sosial, memperjuangkan keadilan, dan membangun perubahan positif di masyarakat.

Dalam era disrupsi digital dan krisis global yang semakin kompleks, pendekatan holistik ini sangat relevan dan mendesak untuk diimplementasikan secara sistematis dalam kurikulum PKn di perguruan tinggi. Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan seperti pandemi, perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, serta ancaman terhadap demokrasi, mahasiswa yang dibekali dengan *civic resilience* yang menyeluruh akan menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kehidupan berbangsa yang inklusif dan berkelanjutan.

Selain itu, penerapan pendekatan holistik juga menuntut adanya perubahan paradigma dalam proses pembelajaran, mulai dari desain kurikulum, metode pengajaran, hingga evaluasi hasil belajar. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi integrasi ketiga dimensi tersebut secara berimbang dan saling melengkapi. Metode pembelajaran harus bersifat interaktif dan partisipatif, mengedepankan pengalaman belajar yang bermakna dan kontekstual, serta menguatkan keterlibatan mahasiswa dalam praktik nyata. Evaluasi tidak hanya mengukur pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan, sehingga dapat memetakan secara komprehensif perkembangan *civic resilience* mahasiswa.

Dengan demikian, pendekatan holistik dalam Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kunci strategis dalam membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki wawasan intelektual yang luas, tetapi juga karakter moral yang kuat dan kemampuan bertindak yang efektif. Hal ini menjadi fondasi penting bagi terbentuknya warga negara yang tangguh, adaptif,



dan bertanggung jawab—suatu kebutuhan mutlak dalam menghadapi kompleksitas tantangan sosial-politik dan budaya di masa depan.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*), yang dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan reflektif dalam memahami konsep *civic resilience* mahasiswa serta peran strategis Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam konteks pasca pandemi COVID-19. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai literatur akademik dan sumber tertulis lain yang relevan dan kredibel sebagai dasar dalam membangun argumentasi dan analisis yang komprehensif.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelusuran dan telaah terhadap berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, artikel ilmiah populer, serta dokumen resmi yang membahas isu-isu terkait kewarganegaraan, civic education, partisipasi mahasiswa, serta dinamika sosial pasca pandemi. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui database daring seperti Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan SINTA, dengan menggunakan kata kunci seperti “civic resilience,” “pendidikan kewarganegaraan,” “mahasiswa pasca pandemi,” “PKn digital,” dan “keterlibatan sosial mahasiswa.” Dalam proses seleksi literatur, peneliti menetapkan kriteria tertentu untuk menjamin validitas dan relevansi data, yaitu: (1) literatur terbit dalam rentang tahun 2020 hingga 2025 untuk menjaga keterkinian konteks, (2) isi literatur relevan langsung dengan fokus penelitian, dan (3) penulis atau sumber berasal dari kalangan akademik atau lembaga yang kredibel di bidang pendidikan, sosial, atau politik.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasi informasi yang terkandung dalam berbagai sumber literatur. Proses analisis dimulai dengan membaca secara mendalam semua teks yang dikumpulkan, kemudian menandai dan mengekstraksi tema-tema utama yang relevan dengan topik penelitian, seperti konsep civic resilience, peran PKn, dampak pandemi terhadap pendidikan dan sosial mahasiswa, pendekatan pembelajaran, serta strategi penguatan kewarganegaraan di era digital. Tema-tema tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu dan dianalisis secara kritis, dengan mengaitkan temuan dari berbagai sumber agar diperoleh pemahaman yang utuh dan saling melengkapi.

Untuk menjamin keabsahan data dan temuan, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan isi dari berbagai jenis referensi, termasuk jurnal, buku, dan

dokumen kebijakan, serta melakukan refleksi kritis terhadap potensi bias dalam penafsiran literatur. Hasil dari proses ini kemudian disajikan dalam bentuk pembahasan yang terstruktur dan sistematis, dengan tujuan menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan civic resilience mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan pasca pandemi.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap pola pendidikan dan partisipasi sosial mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Salah satu dampak paling nyata adalah berkurangnya ruang-ruang interaksi sosial yang sebelumnya secara alami terbentuk melalui kegiatan tatap muka, baik di dalam kelas maupun di luar lingkungan akademik seperti organisasi kemahasiswaan, kegiatan ekstrakurikuler, dan forum-forum diskusi kampus. Pembelajaran daring yang diterapkan sebagai bentuk respons terhadap pembatasan sosial, meskipun berhasil menjaga keberlangsungan proses akademik, pada kenyataannya membawa konsekuensi terhadap kualitas keterlibatan mahasiswa dalam ruang dialog sosial yang penting untuk pembentukan karakter kewarganegaraan mereka. Penurunan partisipasi ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif, di mana mahasiswa menjadi kurang aktif dalam berdiskusi, kurang terpapar pada dinamika sosial nyata, dan kehilangan banyak momentum pengembangan diri melalui interaksi langsung. Sebagaimana dicatat oleh Sari dan Dewi (2023) serta Ramadia et al. (2023), transisi ke sistem pembelajaran daring turut menyebabkan kemerosotan keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kampus dan aktivitas sosial yang selama ini menjadi media penting dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan.

Kondisi tersebut menempatkan *civic resilience* mahasiswa dalam situasi yang cukup menantang. Civic resilience — yang mencakup kemampuan mahasiswa untuk tetap aktif, kritis, tangguh, dan berpartisipasi secara konstruktif dalam masyarakat — mengalami tekanan yang cukup signifikan. Mahasiswa tidak hanya menghadapi hambatan teknis dalam mengakses pendidikan, tetapi juga kehilangan banyak kesempatan untuk mengalami pembelajaran sosial secara langsung. Sebagaimana diungkapkan oleh Sihombing (2022), kondisi ini berpotensi memperlemah kapasitas mahasiswa sebagai warga negara yang kritis dan bertanggung jawab, karena keterampilan kewarganegaraan seperti diskusi terbuka, kerja sama lintas perbedaan, serta refleksi sosial menjadi sulit dikembangkan dalam konteks yang serba virtual dan terbatas.

Namun demikian, di balik krisis yang terjadi, pandemi juga membuka peluang baru, terutama melalui akselerasi digitalisasi dalam kehidupan kampus dan masyarakat. Transformasi digital menghadirkan ruang partisipasi alternatif yang sebelumnya kurang

dimanfaatkan secara optimal. Mahasiswa mulai aktif menggunakan media sosial, platform diskusi daring, webinar, dan forum komunitas digital sebagai sarana untuk tetap terhubung, berdialog, serta menyuarakan aspirasi dan kepedulian mereka terhadap isu-isu publik yang berkembang. Dalam konteks ini, ruang digital tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga arena baru bagi partisipasi kewarganegaraan generasi muda. Penelitian oleh Trihastuti, Firman, dan Widya (2023) menunjukkan bahwa banyak bentuk partisipasi konvensional telah bergeser ke ruang digital, di mana mahasiswa mengorganisasi gerakan, menyebarkan informasi sosial, serta membangun jejaring aksi melalui media berbasis internet. Hal ini juga diperkuat oleh Nurhadi (2022), yang mencatat bahwa mahasiswa kini menunjukkan inisiatif yang tinggi dalam mengadaptasi teknologi untuk mempertahankan peran mereka sebagai agen perubahan di tengah keterbatasan fisik akibat pandemi.

Tentu saja, partisipasi di ruang digital memerlukan bekal literasi digital yang memadai. Dalam situasi informasi yang sangat padat dan terkadang menyesatkan, mahasiswa dituntut untuk mampu memilah informasi secara kritis, mengenali hoaks dan disinformasi, serta mengembangkan etika komunikasi yang bertanggung jawab di ruang digital. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pasca pandemi harus menempatkan literasi digital sebagai komponen kunci dalam kurikulumnya. Literasi digital dalam konteks ini bukan hanya kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat, tetapi mencakup aspek kritis, etis, dan reflektif dalam berinteraksi dengan informasi dan partisipasi digital. Firman dan Widya (2022) serta Nurhadi (2022) menekankan pentingnya integrasi literasi digital dalam pembelajaran PKn sebagai upaya untuk memperkuat daya tahan mahasiswa dalam menghadapi tantangan demokrasi digital, seperti polarisasi opini, penyebaran kebencian daring, dan manipulasi informasi.

Lebih jauh, strategi pembelajaran PKn yang bersifat partisipatif, kontekstual, dan berbasis isu nyata terbukti lebih efektif dalam membangun kapasitas mahasiswa untuk merespons berbagai dinamika sosial. Model pembelajaran seperti *problem-based learning*, *project-based learning*, simulasi kebijakan publik, diskusi reflektif, dan studi kasus nyata mampu menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Pradana, Hidayat, dan Latifah (2023) serta Zahra, Maulana, dan Suryani (2023) menyatakan bahwa metode-metode tersebut mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, memecahkan masalah sosial, dan menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan secara lebih bermakna. Dalam konteks pembelajaran daring sekalipun, pendekatan-pendekatan ini tetap dapat diadaptasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang aktif dan relevan dengan kehidupan nyata.

Selain aspek kognitif dan keterampilan, penanaman nilai-nilai sosial seperti empati, toleransi, solidaritas, dan tanggung jawab juga menjadi bagian integral dalam pembentukan *civic resilience* mahasiswa. Nilai-nilai tersebut memperkuat aspek afektif dari pendidikan kewarganegaraan, yang berperan penting dalam membentuk kepribadian mahasiswa sebagai warga negara berintegritas dan berkomitmen terhadap kehidupan bersama. Hasanah, Pratama, dan Rahayu (2022) menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan nilai-nilai sosial mampu membentuk sensitivitas sosial mahasiswa, meningkatkan kesadaran kolektif, dan membangun rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan bukan sekadar menyampaikan konsep abstrak tentang kewargaan, tetapi menjadi alat transformasi yang membentuk karakter dan moralitas sosial.

Tidak kalah penting, keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan sosial seperti pengabdian masyarakat, kampus merdeka, maupun kegiatan organisasi kemahasiswaan menjadi wahana konkret penerapan nilai-nilai kewarganegaraan. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya memperluas pengalaman sosial mahasiswa, tetapi juga menjadi ajang pembelajaran partisipatif yang mendorong mereka untuk memahami realitas sosial secara langsung, menghadapi tantangan bersama masyarakat, serta mengembangkan empati dan kepemimpinan. Hidayah, Ramadia, dan Sari (2022) menekankan bahwa keterlibatan aktif mahasiswa dalam kehidupan sosial merupakan indikator kuat dari terbentuknya *civic resilience* yang tidak hanya normatif tetapi juga fungsional dan aplikatif.

Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan di era pasca pandemi harus bersifat adaptif, kontekstual, dan inklusif. Kurikulum dan metode pengajaran perlu mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, dan nilai secara seimbang. Tujuannya bukan hanya agar mahasiswa memiliki pemahaman teoritis tentang kewarganegaraan, tetapi juga membekali mereka dengan kapasitas untuk bereaksi terhadap perubahan sosial, berkontribusi secara nyata di masyarakat, dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi dalam berbagai situasi. Pendekatan holistik seperti yang dikemukakan oleh Nasoha (2024) menjadi sangat relevan dalam hal ini, karena menggabungkan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam satu kesatuan yang membentuk ketahanan kewarganegaraan yang utuh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, PKn pasca pandemi harus menjadi lebih dari sekadar mata kuliah wajib—ia harus menjadi sarana transformasi sosial yang strategis dalam mencetak generasi muda yang resilien, cerdas, dan berintegritas.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Penguatan *civic resilience* mahasiswa pasca pandemi COVID-19 menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak dan strategis dalam konteks pendidikan tinggi saat ini. Pandemi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial dan partisipasi mahasiswa yang selama ini menjadi elemen penting dalam pembentukan karakter kewarganegaraan yang tangguh, kritis, dan adaptif. Penurunan interaksi tatap muka dan keterbatasan kegiatan sosial selama pandemi menimbulkan tekanan terhadap kemampuan mahasiswa untuk tetap aktif dan berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di perguruan tinggi harus bertransformasi secara menyeluruh, tidak hanya menekankan pada aspek teoritis, tetapi juga pada praktik pembelajaran yang partisipatif, kolaboratif, serta pengembangan literasi digital sebagai kompetensi utama. Melalui pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan berbasis isu nyata, mahasiswa tidak hanya memahami konsep kewarganegaraan secara intelektual, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai sosial seperti empati, toleransi, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan ruang digital menjadi manifestasi nyata dari penerapan nilai-nilai kewarganegaraan, sekaligus memperkuat ketahanan emosional dan sosial mereka dalam menghadapi berbagai dinamika sosial-politik. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan pasca pandemi harus diorientasikan pada pembentukan mahasiswa yang memiliki *civic resilience* secara holistik — yang resilien dalam berpikir, bertindak, dan bersikap — agar mereka mampu menjadi agen perubahan yang berintegritas dan berdaya dalam konteks sosial yang semakin kompleks dan dinamis.

### Saran

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan yang mendalam, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan untuk memperkuat *civic resilience* mahasiswa pasca pandemi. Pertama, perguruan tinggi disarankan untuk melakukan revisi dan pengembangan kurikulum PKn yang lebih responsif terhadap perubahan sosial dan kemajuan teknologi digital. Kurikulum tersebut hendaknya mengintegrasikan modul literasi digital yang mencakup kemampuan kritis dalam memilah informasi, mengenali hoaks dan disinformasi, serta pengembangan etika komunikasi di ruang digital, selain isu-isu kebangsaan yang aktual dan relevan. Kedua, dosen PKn perlu didorong dan difasilitasi untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif, seperti simulasi kebijakan publik, studi kasus, diskusi reflektif, serta pembelajaran

berbasis proyek. Metode pembelajaran tersebut dapat meningkatkan keterlibatan aktif mahasiswa dan membantu mereka mengasah kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengembangkan sikap sosial yang positif. Ketiga, perguruan tinggi harus memberikan lebih banyak kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam kegiatan sosial, baik melalui program pengabdian masyarakat, organisasi kemahasiswaan, maupun keterlibatan di komunitas digital yang konstruktif. Keterlibatan ini sangat penting untuk memperkuat dimensi afektif dan sosial dalam pembentukan ketahanan kewarganegaraan. Keempat, perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris, seperti wawancara mendalam dan survei, untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran PKN yang diimplementasikan serta memperluas cakupan studi ke berbagai perguruan tinggi di berbagai daerah. Penelitian empiris tersebut akan memberikan gambaran yang lebih valid dan komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam membangun *civic resilience* mahasiswa di era pasca pandemi. Dengan implementasi saran-saran ini, diharapkan Pendidikan Kewarganegaraan dapat berkontribusi secara maksimal dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara emosional dan sosial dalam menghadapi tantangan masa depan

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. M. N. (2023). Penguatan civic resilience dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civics*, 8(2), 41-57.
- Ahmad, M. M. N., Hidayat, R., & Dewi, S. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan digital di masa pandemi. *Jurnal Pendidikan Digital*, 4(1), 67-80.
- Ahmad, M. M. N., Kurniawan, S. (2022). Literasi media dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1), 23-38.
- Ahmad, M. M. N., Latifa, N., & Rahayu, S. (2023). Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di era pasca pandemi. *Jurnal Civics & Social Studies*, 7(2), 50-65.
- Ahmad, M. M. N., Nurhadi, B. (2022). Digitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan dan dampaknya. *Jurnal Pendidikan Digital*, 3(1), 12-27.
- Ahmad, M. M. N., Santoso, A. (2021). Resiliensi mahasiswa dalam konteks demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(2), 35-49.
- Dewi, S., & Santoso, A. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan dan peranannya dalam pengembangan civic resilience mahasiswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 12(1), 45-58.
- Firman, R., & Widya, L. (2022). Literasi digital dan keterlibatan politik mahasiswa di era digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 8(2), 101-115.

- Hasanah, N., Pratama, D., & Rahayu, S. (2022). Peran organisasi kemahasiswaan dalam meningkatkan tanggung jawab sosial. *Jurnal Sosiologi Pendidikan*, 10(1), 30-44.
- Hidayah, A., Ramadia, F., & Sari, L. (2022). Dampak pandemi COVID 19 terhadap keterlibatan sosial mahasiswa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 15(3), 67-81. <https://doi.org/10.55623/ad.v3i1.111>
- Latifa, N., & Hendra, M. (2023). Model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif di perguruan tinggi. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 5(1), 22-36.
- Maulana, T., Zahra, F., & Suryani, E. (2023). Tantangan dan peluang Pendidikan Kewarganegaraan di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 9(2), 77-91.
- Nasoha, A. M. M. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan dan resiliensi mahasiswa di masa pandemi. *Jurnal Civics & Social Studies*, 7(1), 15-29.
- Nurhadi, B. (2022). Keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas kewarganegaraan digital. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 6(3), 89-102.
- Pradana, I., Hidayat, R., & Latifah, S. (2023). Strategi pembelajaran problem based learning dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 4(1), 40-54.
- Pratama, D., & Rahayu, S. (2023). Literasi digital dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Digital*, 3(2), 55-68. <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.39>
- Ramadia, F., Hidayah, A., & Sari, L. (2023). Efektivitas pembelajaran daring di masa pandemi COVID 19. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7(1), 33-47. <https://doi.org/10.55904/educenter.v1i5.165>
- Sari, L., & Dewi, S. (2023). Penurunan partisipasi sosial mahasiswa akibat pandemi. *Jurnal Ilmu Sosial*, 14(4), 22-35.
- Sihombing, R. (2022). Dimensi civic resilience dalam konteks pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2), 58-73.
- Suryani, E. (2022). Kajian civic resilience di Indonesia: tinjauan pendidikan. *Jurnal Studi Sosial*, 8(1), 12-25.
- Trihastuti, A., Firman, R., & Widya, L. (2023). Civic engagement mahasiswa melalui media sosial. *Jurnal Media dan Pendidikan*, 10(2), 90-104.
- Wulandari, D., & Hadi, P. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan berbasis digital. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 6(3), 50-64.
- Zahra, F., Maulana, T., & Suryani, E. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan dan pembentukan karakter demokratis mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Demokrasi*, 5(1), 15-29.
- Zulfikar, M. (2022). Media digital sebagai sarana edukasi politik mahasiswa. *Jurnal Ilmu Politik*, 9(3), 80-95.